

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat maupun pemerintah. Keterbukaan informasi publik diatur dalam UU No.14 Tahun 2008. Penyelenggaraan proyek pemerintah harus memiliki keterbukaan informasi publik yang terdiri dari 3 unsur utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Salah satu keberhasilan pemerintah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan pembangunan nasional tidak terlepas dari kemampuan memahami pemerintahan yang transparan dan dukungan masyarakat.. Maka dari itu gambaran dan batasan transparansi informasi publik perlu diketahui pelaksanaannya.

Pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bidang penyelenggaraan konstruksi diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih demokratis. Salah satu aspek penyelenggaraan konstruksi secara terbuka yang saat ini telah berjalan yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam bentuk situs dimana situs tersebut berisi informasi terbatas mengenai pelelangan proyek konstruksi, pengadaan barang dan jasa serta informasi tender.

Kontraktor sebagai salah satu penyedia jasa konstruksi yang selanjutnya disebut pelaksana konstruksi mempunyai peranan penting terhadap adanya informasi penyelenggaraan konstruksi secara terbuka. Aliran informasi dalam proses penyelenggaraan konstruksi dapat memudahkan publik untuk mengetahui informasi mengenai proyek tersebut. Lembaga internasional *Construction Sector Transparency Initiative (CoST)* mengeluarkan 41 indikator sebagai standar data transparansi infrastruktur yang terbagi atas dua fase yaitu fase proyek dan fase kontrak. Jika diketahui indikator tersebut dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan negara. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan judul **“Analisis Transparansi Pelaksana Konstruksi pada Penyelenggaraan Proyek Pemerintah di Jawa Barat”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Landasan hukum yang digunakan adalah perundang-undangan yang terkait keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan konstruksi.
2. Transparansi penyelenggaraan konstruksi yang saat ini telah berjalan yaitu penerapan *E-procurement* pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
3. Penerapan indikator lembaga *Construction Sector Transparency Initiative* (CoST) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
4. Gambaran informasi penyelenggaraan konstruksi secara terbuka pada pelaksana konstruksi di Jawa Barat

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Landasan hukum yang digunakan adalah peraturan dan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan konstruksi.
2. Indikator yang digunakan yaitu berdasarkan *Construction Sector Transparency Initiative* (CoST).
3. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menyebarkan kuisisioner dan melakukan wawancara mendalam pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pihak pelaksana konstruksi di Jawa Barat..

Berdasarkan pada batasan masalah pada penelitian ini, maka dapat diangkat rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana gambaran transparansi berdasarkan penyelenggara konstruksi pada sektor pemerintah dengan teknik analisis data *Principal Components Analysis* (PCA) ?
2. Bagaimana perbandingan indikator CoST dengan kondisi eksisting dilapangan.?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ada dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran transparansi menurut persepsi pelaksana konstruksi pada sektor pemerintah dengan teknik analisis data *Principal Components Analysis* (PCA).
2. Membandingkan indikator CoST dengan kondisi eksisting dilapangan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran transparansi dalam penyelenggaraan konstruksi.
2. Memberikan kontribusi bagi ilmu manajemen konstruksi serta diharapkan dapat juga memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian di bidang kajian konstruksi.
3. Sebagai bahan referensi dan informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

### 1.5 Struktur Organisasi Tugas Akhir

Agar penyampaian dalam laporan penelitian ini lebih sistematis, maka sistematika penulisan yaitu sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**, bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

**Bab II Kajian Pustaka**, bab ini berisikan tentang teori-teori dasar yang dipakai sebagai acuan dan landasan yang berhubungan dengan penelitian.

**Bab III Metode Penelitian**, bab ini berisikan metodologi yang akan menjadi alur dalam analisis yang akan dilakukan serta menguraikan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

**BAB IV Temuan Dan Pembahasan**, bab ini berisikan hasil temuan penelitian dan pembahasan dari analisa data yang telah dilakukan serta diperoleh kesimpulan hasil penelitian.

**BAB V Simpulan, Implikasi Dan Rekomendasi**, bab ini berisikan simpulan yang didapat dari hasil penelitian serta memberikan implikasi atau rekomendasi untuk perbaikan dalam suatu perencanaan dikemudian hari.